

Daftar Kepustakaan

A. Buku

- Abdul Khakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil. dan Christine S.T Kansil. 2008. *Pemerintahan Daerah Di indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J Kaloh, 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Kansius.
- Miftah Thoha. 2014. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Philips M.Hadjon. 1986. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Philippus M. Hadjon. Dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeryono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sri Hartini Setiajeng Kadarsih. dan Tedi Sudrajat. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Victor M. Situmorang. dan Cormentyana Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Surat Edaran MENPAN No. 5 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 77 Tahun 2018 Pedoman Umum Pembinaan Tenaga Kontrak Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

C. Jurnal

Baiq. Sriastuti, “Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang N0.5 Tahun 2014”. Jurnal IUS. Vol. V No. 2, Agustus 2017, hlm, 284-294.

Agustinus Didik, Siswidiyanto, Stefanus Pani Rengu “Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Era Otonomi Daerah” Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol .1, No.3, h.lm . 34-41.

D. Internet

<http://www.sarolangunkab.go.id/v3/index.php/pemerintahan/sejarah> diakses pada tanggal 4 September 2020, Pukul 8.00 WIB.

<https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-11-geografis-sarolangun.html> diakses pada tanggal 4 September 2020, Pukul 8.30 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/29/190500065/daftar-ump-34-provinsi-di-indonesia-dari-yang-terendah-hingga-tertinggi> diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 12.20 WIB.